

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga pemerintah non kementerian memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika serta ikut andil dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dalam tugasnya Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang bukti sitaan tindak pidana narkotika. Melalui penyidik yang telah ditunjuk untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil kejahatan, kemudian barang bukti yang telah ditetapkan sebagai barang sitaan dapat dimusnahkan setelah menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Adanya pembatasan waktu dalam pemusnahan barang bukti sitaan menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan yang akan diangkat disini adalah bagaimana proses dari pelaksanaan penyitaan barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN serta bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, dimana penulis melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan sumber data yang didapatkan atau digunakan yakni data sekunder maupun wawancara dengan pihak untuk mendapatkan informasi ataupun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkotika yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi masih belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika dikarenakan pelaksanaannya lebih lama atau tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : penyitaan, pemusnahan, barang bukti narkotika, tindak pidana narkotika

ABSTRAK

The National Anti Narcotics Agency as a non-ministerial government institution has the duty and authority to prevent and eradicate narcotics trafficking and take part in the existing justice system in Indonesia. In its duties, the National Anti Narcotics Agency has the authority to destroy evidence confiscated for narcotics crimes. Through an investigator who has been appointed to confiscate evidence resulting from crime, then evidence that has been determined as confiscated goods can be destroyed after receiving a destruction determination from the local chief district attorney. The time limit in the destruction of confiscated evidence raises the question of whether the implementation is in accordance with existing regulations. The issue that will be raised here is how the process of the implementation of the confiscation of confiscated goods carried out by BNN investigators and how to carry out the destruction of evidence resulting from narcotics crimes at the National Anti Narcotics Agency of Jambi Province. This research is included in emprise juridical research, where the author approaches the law and the source of data obtained or used, namely secondary data or interviews with parties to obtain information or answers to problems in this study. The destruction of confiscated narcotics crimes carried out at the National Narcotics Agency of Jambi Province is still not in accordance with the Laws and Regulations on Narcotics because the implementation is longer or not in accordance with the predetermined deadline.

Keywords: Confiscation, destruction, narcotics evidence, and narcotics crimes